

PROBLEMATIKA GURU PEMBIMBING KHUSUS DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN PADA ABK DI SDN GADANG 2 BANJARMASIN

Muhammad Sajali*, Ali Rachman, Mirnawati

Program Studi Pendidikan Khusus FKIP Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding Author: sajalimhmd@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi oleh guru pembimbing khusus dalam pada ranah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah 6 orang guru pembimbing khusus. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan datanya adalah *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika guru pembimbing khusus SDN Gadang 2 Banjarmasin dalam a) perencanaan pembelajaran seperti kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam melakukan asesmen, waktu pelaksanaan asesmen yang tidak lama, kondisi emosional/mood, perilaku, dan konsentrasi siswa berkebutuhan khusus saat proses asesmen, program yang dibuat kadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan kepada siswa berkebutuhan khusus dan kadang siswa berkebutuhan khusus dipaksakan mengikuti sistem pembelajaran siswa reguler yang tentu berbeda kemampuannya. Problematika pada b) pelaksanaan pembelajaran adalah kondisi emosional/mood siswa berkebutuhan khusus yang tidak stabil yang berakibat pada penggunaan metode, media, dan penyampaian materi pembelajaran. Problematika pada c) evaluasi adalah guru pembimbing khusus harus menyiapkan soal tersendiri khusus untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat disamakan dengan siswa reguler, meluangkan waktu lebih lama untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus menjawab soal, dan sulitnya menentukan teknik penilaian yang cocok untuk beberapa siswa berkebutuhan khusus yang didampingi dengan kemampuan yang berbeda-beda pula

Kata Kunci: Problematika, guru pembimbing khusus

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pendidikan ialah hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, status sosial ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang. Hal ini yang menjadi dasar bahwa anak-anak yang memiliki kelainan atau sering dikenal dengan anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan sama seperti anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan juga merupakan hak dasar untuk semua individu, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan: “ (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus berbeda dengan anak pada umumnya karena keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus lebih signifikan. Perbedaan sistem pendidikan ini bertujuan mengoptimalkan layanan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Di Indonesia pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pernah mengalami pergeseran paradigma yang awalnya menggunakan sistem segregasi dimana anak berkebutuhan khusus dilihat dari aspek karakteristik hambatan atau kecacatannya (*labeling*) sehingga setiap hambatan harus diberikan layanan pendidikan yang khusus dan berbeda dari hambatan lainnya atau dalam pelaksanaannya terdapat sekolah khusus atau biasa dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita, dan lain-lain yang secara tidak langsung hal ini telah mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus karena menghambat terjadinya interaksi sosial antara anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan upaya pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi, sebagai salah satu solusinya melalui pendidikan inklusi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Sebagaimana yang ditegaskan melalui Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif yang menyatakan "Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya". Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah dan diperuntukkan untuk semua anak, pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar dalam lingkungan yang sama dengan anak pada umumnya, namun bukan berarti inklusif hanya terfokus pada anak berkebutuhan khusus saja, tetapi juga kepada anak-anak yang termarginalkan.

Fakta dan kondisi yang tampak di lapangan, masih banyak yang menghambat suksesnya penyelenggara pendidikan inklusif di Negara ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah yang belum menerima anak berkebutuhan khusus dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana maupun belum tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten di bidang pendidikan khusus. Seharusnya SDM (Sumber Daya Manusia) ini sangat dibutuhkan di sekolah inklusi karena merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, Subini (2014). SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimaksud disini adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Guru pembimbing khusus menurut Kustawan (2012) adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang ditugaskan di sekolah umum dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kualifikasi akademik minimum guru pendamping khusus adalah lulusan S1/AIV Jurusan Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa. Adapaun beberapa tugas guru pembimbing khusus menurut Kustawan (2012) yaitu memberikan bantuan profesional dalam proses penerimaan siswa baru berkebutuhan khusus, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi kepada siswa berkebutuhan khusus dan memberikan bantuan profesional dalam mengembangkan kurikulum yang fleksibel, program pembelajaran individual (PPI), media, sumber belajar, sarana dan prasarana yang aksesibel, dan dalam proses penilaian.

Berdasarkan pengamatan saat PPL di SDN Gadang 2 Banjarmasin yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin nomor 412/290-DS/Dipendidik 2013. Guru pembimbing khusus yang tidak berlatarbelakang pendidikan khusus banyak mengajar di sini sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana guru pembimbing khusus tersebut melakukan pembelajaran dan pendampingan pada siswa berkebutuhan khusus serta melakukan tugasnya. Tentu dalam pelaksanaannya banyak kendala atau permasalahan karena guru pembimbing khusus tersebut tidak memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang "Problematika Guru Pembimbing Khusus dalam Melakukan Pendampingan pada ABK di SDN Gadang 2 Banjarmasin".

2. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam karena disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Subjek dalam penelitian ini ada 6 orang guru pembimbing khusus yang bukan berlatarbelakang Pendidikan Khusus mendampingi siswa berkebutuhan khusus kelas I-b, II-b, III-b, IV-a, V-b, dan VI-a SDN Gadang 2 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menurut Sugiyono (2016) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan *membercheck* sebagai salah satu teknik keabsahan data dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Guru Pembimbing Khusus dalam Perencanaan Pembelajaran ABK di SDN Gadang 2 Banjarmasin

Penelitian yang telah dilakukan di SDN Gadang 2 Banjarmasin menunjukkan beberapa problematika yang dihadapi guru pembimbing khusus dari segi perencanaan pembelajaran khususnya saat melakukan yaitu kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing guru pembimbing khusus sehingga mereka kesulitan dalam melakukan asesmen. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Kustawan (2012) bahwa guru pembimbing khusus harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus. Waktu pelaksanaan

asesmen yang tidak lama juga menjadikan hasil yang diperoleh kadang tidak sesuai dengan kondisi asli siswa berkebutuhan khusus. Padahal seharusnya asesmen harus dilakukan secara terus menerus atau *continue* seperti yang diungkapkan oleh Mary A. Falvey (Yuwono, 2015) bahwa dalam menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi siswa berkebutuhan khusus, seharusnya asesmen dilakukan secara terus-menerus (*continue*). Selain itu, kendala juga datang dari diri siswa berkebutuhan khusus itu sendiri seperti perilaku, kondisi emosional/mood, dan konsentrasinya yang sering berubah-ubah atau tidak stabil yang akan menyulitkan proses pelaksanaan asesmen.

Selain pada asesmen, problematika juga terjadi ketika guru pembimbing khusus merancang program pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus seperti tidak sepenuhnya program yang dibuat dapat diterapkan ke siswa berkebutuhan khusus karena harus melihat situasi dan kondisi siswa berkebutuhan khusus saat proses pembelajaran dan kadang siswa berkebutuhan khusus secara tidak langsung dipaksakan mengikuti sistem pembelajaran siswa reguler yang tentu berbeda kemampuannya. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Garnida (2015) bahwa walaupun sebagian besar guru di sekolah inklusi tidak membedakan RPP bagi siswa umum dan siswa berkebutuhan khusus, namun dalam pelaksanaannya untuk siswa berkebutuhan khusus menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan pada siswa reguler.

3.2 Problematika Guru Pembimbing Khusus dalam Pelaksanaan Pembelajaran ABK di SDN Gadang 2 Banjarmasin

Problematika yang dihadapi oleh guru pembimbing khusus pada tahap pelaksanaan lebih kepada kondisi emosional/mood siswa berkebutuhan khusus yang tidak stabil sehingga menyulitkan guru pembimbing khusus dalam menggunakan metode atau media tertentu yang juga berakibat pada penyampaian materi pembelajaran yang tidak bisa full 1 jam pelajaran seperti siswa reguler. Selain itu, kurangnya media pembelajaran dari sekolah mengakibatkan guru pembimbing khusus harus membuat sendiri media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa berkebutuhan khusus. Padahal penggunaan media pembelajaran ini akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa seperti yang diungkapkan oleh Karo dan Rohani (2018) bahwa manfaat media pembelajaran yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, interaktif, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan lain-lain.

3.3 Problematika Guru Pembimbing Khusus dalam Melakukan Evaluasi Pembelajaran ABK di SDN Gadang 2 Banjarmasin

Problematika juga dihadapi oleh guru pembimbing pada tahap evaluasi pembelajaran seperti bentuk dan jumlah soal yang dibuat tersendiri khusus untuk siswa berkebutuhan khusus dan tidak dapat disamakan dengan siswa reguler lainnya. Waktu untuk siswa berkebutuhan khusus menjawab soal lebih lama daripada siswa reguler, dan guru pembimbing khusus mengalami kesulitan saat menentukan teknik penilaian yang cocok untuk beberapa siswa berkebutuhan khusus yang didampinginya dengan kemampuan yang berbeda-beda pula.

Hasil penelitian Tarnoto (2016) yang berjudul permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD menunjukkan hasil masih banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan siswa, orangtua, guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah seperti kurangnya sarana prasarana yang aksesibel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini karena kurangnya kerjasama dari berbagai pihak dan warga sekolah yang kurang menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik di sekolah itu sendiri ataupun komunitas di luar sekolah tersebut. Selain itu, hasil penelitian Sari (2012) tentang pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh yang menunjukkan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Program yang seharusnya disusun dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait seperti identifikasi, asesmen, program layanan, RPP dan PPI tidak teraksana dengan baik, jika program yang diberikan tidak dilaksanakan maka laporan tertulis pelaksanaan seluruh program juga tidak ada, sebaiknya para guru, GPK, kepala sekolah memang benar-benar melakukan tanggung jawabnya dan tahu tugasnya sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Terlihat sekali kurang efektifnya ketika GPK hanya mendampingi satu orang anak saja dari 30 orang ABK yang terdata di sekolah itu sementara kurangnya sarana dan prasarana disekolah tidak ditindak lanjuti dengan tegas oleh kepala sekolah.

Sebagai perbandingan dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain seperti di atas, namun masih dengan tema yang sama menunjukkan masih

banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah inklusi maupun yang dihadapi oleh guru pembimbing khusus. Oleh karena itu, penyelenggaraan sekolah inklusif masih belum berjalan dengan maksimal, maka untuk itu perlu ditingkatkan lagi kompetensi guru pembimbing khusus terutama yang bukan berlatarbelakang pendidikan khusus.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, problematika yang dihadapi oleh guru pembimbing khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin sebagai berikut:

- 4.1 Problematika pada perencanaan adalah kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam melakukan asesmen, waktu pelaksanaan asesmen yang tidak lama, kondisi emosional/mood, perilaku, dan konsentrasi siswa berkebutuhan khusus saat proses asesmen. Selain itu, program yang dibuat oleh guru pembimbing khusus kadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan ke siswa berkebutuhan khusus dan secara tidak langsung siswa berkebutuhan khusus kadang dipaksakan mengikuti sistem pembelajaran siswa reguler yang tentu berbeda kemampuannya.
- 4.2 Problematika pada pelaksanaan pembelajaran adalah kondisi emosional/mood siswa berkebutuhan khusus yang tidak stabil sehingga menyulitkan guru pembimbing khusus dalam menggunakan metode atau media tertentu yang juga berakibat pada penyampaian materi pembelajaran yang tidak bisa full 1 jam pelajaran seperti siswa reguler. Selain itu, kurangnya media pembelajaran yang bervariasi dari sekolah mengharuskan guru pembimbing khusus menyiapkan dan membuat sendiri media untuk menunjang proses pembelajaran.
- 4.3 Problematika pada evaluasi adalah bentuk dan jumlah soal yang dibuat tersendiri khusus untuk siswa berkebutuhan khusus dan tidak dapat disamakan dengan siswa reguler lainnya. Waktu untuk siswa berkebutuhan khusus menjawab soal lebih lama daripada siswa reguler, dan guru pembimbing khusus mengalami kesulitan saat menentukan teknik penilaian yang cocok untuk beberapa siswa berkebutuhan khusus yang didampinginya dengan kemampuan yang berbeda-beda pula.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Karo, Isran Rasyid dan Rohani. 2018. Manfaat Media dalam Pembelajaran. *Jurnal Axiom*, 7 (1): 91-96
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima
- Sari, Winda Quida. 2012. Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1 (1): 190-197
- Subini, Nini. 2014. *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Yogyakarta: Maxima
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tarnoto, Nissa. 2016. Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Pada Tingkat SD. *Jurnal Humanitas*, 13 (1): 45-62
- Yuwono, Imam. 2015. *Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Setting Pendidikan Inklusif*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan Inklusif